

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. *State of The Art*

Penulis akan memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik permasalahan pada penelitian ini, tujuannya untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan antara keduanya yang dijadikan sebagai perbandingan. Adapun penelitian sebelumnya sebagai rujukan dan pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah yaitu:

1. Sumitra (2023), dengan judul “Implementasi Kurikulum Belajar Mandiri Mata Pelajaran PJOK di Sekolah Dasar Kabupaten Beringin”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kurikulum belajar mandiri dalam pembelajaran PJOK di SD se-Kabupaten Beringin. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 62,5% guru menyatakan berjalan baik dan 37,5% menyatakan berjalan sedang atau cukup baik. Kemudian sebanyak 62,5% siswa menyatakan berjalan baik dan 37,5% menyatakan berjalan sedang atau cukup baik.
2. Setiawan & Febrianta (2024), dengan judul penelitian “Keterlaksanaan Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di Sekolah Dasar Negeri 1 Sumbang Pada Kurikulum Merdeka”. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis keterlaksanaan pembelajaran PJOK di SDN 1 Sumbang pada Kurikulum Merdeka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlaksanaan pembelajaran PJOK di SDN 1 Sumbang pada Kurikulum Merdeka sudah berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan guru Mapel PJOK telah mengikuti Bimbingan Teknik Kurikulum Merdeka dan mempersiapkan perangkat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
3. Hidayat et al., (2024), dengan judul penelitian “*Implementation of the Kurikulum Merdeka in Physical Education*”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran PJOK di SMPN 5 Tasikmalaya tahun 2024. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran PJOK di SMPN 5 Tasikmalaya memberikan pengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa, meskipun masih terdapat hambatan dan tantangan yang dihadapi guru dan Waka Kurikulum memiliki persepsi positif terhadap fleksibilitas dan inovasi yang ditawarkan oleh Kurikulum Merdeka.

4. Saputri et al., (2024), dengan judul “Implementasi Kurikulum Merdeka: Perspektif Guru Sekolah Dasar”. Tujuan penelitian adalah untuk melihat bagaimana dinamika IKM dari perspektif guru SDN Samirano. Hasilnya menunjukkan penerapan IKM sudah sesuai dengan konsep Kurikulum Merdeka yang mana mengutamakan minat bakat siswa, menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, budaya dan untuk mencapai tujuan nasional pendidikan.
5. Sumarsih et al., (2022), dengan judul penelitian “Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar. Hasilnya, Kurikulum Merdeka yang dijadikan sebagai acuan menciptakan siswa yang berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan rasa kebhinekaan.
6. Mulyadi et al., (2024), dengan judul “*Evaluative Study of the Implementation of the Independent Curriculum in Physical Education Elementary School Level Using the CIPP Model*”. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi penerapan Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran PJOK di jenjang sekolah dasar dengan menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Hasil penelitian menunjukkan ada variasi yang signifikan dalam penerapan Kurikulum Merdeka antar sekolah. Evaluasi input menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam kesiapan sekolah, terutama dalam kemampuan guru dan ketersediaan sumber daya. Evaluasi produk menunjukkan berbagai perbedaan dalam upaya pengembangan kompetensi siswa. Penelitian

ini menyimpulkan bahwa diperlukan strategi implementasi yang lebih terdiferensiasi dan kontekstual, serta mendapatkan dukungan berkelanjutan dalam pengembangan profesional guru dan peningkatan infrastruktur pendidikan.

7. Liu et al., (2023), dengan judul penelitian *“Analysis of Physical Education Classroom Teaching after Implementation of the Chinese Health Physical Education Curriculum Model: A Video-Based Assessment”*. Penelitian ini bertujuan untuk menilai model kurikulum pendidikan jasmani kesehatan Tiongkok yang baru-baru ini disarankan untuk memenuhi reformasi kurikulum pendidikan jasmani yang direkomendasikan guna mengatasi kesehatan fisik dan mental siswa yang menurun di Tiongkok. Hasil penelitian ditemukan bahwa guru di sekolah dasar menggunakan pertanyaan tertutup, respons yang dapat diprediksi, dan umpan balik secara signifikan lebih sering daripada guru di sekolah menengah atas. Terdapat tiga pola pengajaran paling umum digunakan yaitu ceramah, praktik, dan dialog. Pola mengajar praktik menjadi yang dominan. Terdapat 5 jenis kata yang paling sering diucapkan oleh guru yaitu wacana, motivasi, direktif, khusus, dan transisi. Pengaturan dengan kata-kata motivasi menjadi yang paling sering digunakan sehingga suasana kelas lebih positif. Temuan ini memberikan bukti bahwa penggunaan model kurikulum ini dapat membawa perubahan positif pada metode pengajaran kelas pendidikan jasmani di Tiongkok dan akan menginformasikan praktik pengajaran kelas pendidikan jasmani inovatif berikutnya.
8. Kugara, (2025), dengan judul penelitian *“Challenges in the Implementation of the New Curriculum in Physical Education and Sport: A Case Study of Mhondoro Rural District, Mashonaland West Province in Zimbabwe”*. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tantangan yang dihadapi oleh guru sekolah dasar dalam pelaksanaan kurikulum baru pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah dasar Distrik Pedesaan Mhondoro, Provinsi Mashonaland Barat, Zimbabwe.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru mengakui pentingnya pendidikan jasmani, tetapi persaingan dari mata pelajaran akademik lainnya telah memaksa banyak sekolah untuk mengurangi atau membatalkan beberapa program pendidikan jasmani. Sehingga, guru perlu bekerja sama dan berbagi informasi tentang peningkatan dan penguatan penyampaian program pendidikan jasmani di sekolah dasar. Disarankan agar dilakukan studi perbandingan tentang implementasi pendidikan jasmani dan olahraga di wilayah perkotaan. Hal ini akan membantu mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh guru di sekolah.

9. Donkor & Domfeh, (2024), dengan judul penelitian "*Classroom Practices of Basic School Teachers in the Implementation of the Standards-Based Physical Education Curriculum in Public Basic Schools in the Effutu Municipality, Ghana*". Studi ini meneliti praktik kelas guru sekolah dasar negeri dalam menerapkan Kurikulum Pendidikan Jasmani Berbasis Standar di sekolah negeri di Kotamadya Effutu, Ghana. Hasilnya menyoroti bahwa perencanaan pembelajaran merupakan praktik yang dominan dilakukan oleh guru yang kemudian diikuti oleh penilaian, umpan balik, motivasi dan disiplin, dan refleksi. Kemudian guru perlu meningkatkan keterlibatan dalam Komunitas Pembelajaran Profesional demi mendorong pengembangan berkelanjutan.
10. Bratten & Kilanowska, (2021), dengan judul penelitian "*Physical education and new forms of activity following the implementation of the core curriculum in Norway in 2020*". Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti penggunaan aktivitas dengan denyut nadi rendah dapat merangsang kegembiraan bergerak, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih luas tentang perkembangan holistik siswa. Hasil studi menunjukkan bahwa aktivitas tersebut dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keyakinan pada diri siswa serta berkontribusi pada pencapaian tujuan Pendidikan jasmani.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis dan Tahun Terbit	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dani Alfa Sumitra, 2023	Implementasi Kurikulum Belajar Mandiri Mata Pelajaran PJOK di Sekolah Dasar Kabupaten Beringin	1. Mengkaji mengenai implementasi Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran PJOK di sekolah dasar	1. Fokus penelitian ini ada pada penerapan Kurikulum Belajar Mandiri 2. Lokus penelitian 3. Menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif
2	Dimas Setiawan dan Yuda Febrianta, 2024	Keterlaksanaan Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di Sekolah Dasar Negeri 1 Sumbang Pada Kurikulum Merdeka	1. Mengkaji mengenai implementasi Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran PJOK di sekolah dasar 2. Menggunakan metode penelitian kualitatif 3. Teknik pengambilan data	1. Fokus penelitian ada pada keberhasilan pada aspek perencanaan dan pelaksanaan Kurikulum Merdeka 2. Lokus penelitian
3	Cucu Hidayat, Angelina Nur Ichsan, Ida Wahidah, Endah Listyasari, Aang Rohyana, Ucu Muhammad Afif, Agus Arief Rahmat (2024)	<i>Implementation of the Kurikulum Merdeka in Physical Education</i>	1. Mengkaji mengenai implementasi Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran PJOK 2. Menggunakan metode penelitian kualitatif 3. Teknik pengambilan data	1. Fokus penelitian ada pada upaya untuk menemukan elemen yang memengaruhi motivasi belajar siswa, tantangan, hambatan, persepsi, dan strategi untuk menerapkan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran PJOK 2. Lokus penelitian
4	Saputri Hera Apriliana, Sinta Bella, Zulhijrah,	Implementasi Kurikulum Merdeka: Prespektif Guru Sekolah Dasar	1. Mengkaji mengenai Implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar	1. Lokus penelitian 2. Teknik pengambilan data

	dan Andi Prastowo (2024)		2. Menggunakan metode penelitian kualitatif	
5	Ineu Sumarsih, Teni Marliyani, Yadi Hadiyansah, Asep Herry Hernawan dan Prihantini, (2022)	Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar	1. Mengkaji mengenai Implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar 2. Menggunakan metode penelitian kualitatif 3. Teknik pengambilan data	1. Fokus penelitian ada pada penerapan kurikulum merdeka secara keseluruhan 2. Lokus penelitian
6	Mulyadi, Muhammad Furqon Hidayatullah, Rony Syaifullah, Slamet Riyadi, (2024)	<i>Evaluative Study of the Implementation of the Independent Curriculum in Physical Education Elementary School Level Using the CIPP Model</i>	1. Mengkaji tentang Kurikulum Merdeka Pada Mapel PJOK 2. Menggunakan metode penelitian kualitatif	1. Kajian penelitian ini ada pada evaluasi penerapan Kurikulum Merdeka Mapel PJOK dengan menggunakan Model CIPP 2. Fokus utama penelitian ini untuk memastikan efektivitas penerapan Kurikulum Merdeka. 3. Lokus Penelitian
7	Chao Liu, Cuixiang Dong, Xiaohui Li, Huanhuan Huang and Qiulin Wang (2023)	<i>Analysis of Physical Education Classroom Teaching after Implementation of the Chinese Health Physical Education Curriculum Model: A Video-Based Assessment</i>	1. Mengkaji tentang kurikulum pada pembelajaran pendidikan jasmani	1. Fokus penelitian ada pada analisis model kurikulum untuk mengatasi permasalahan kesehatan fisik dan mental di Tiongkok 2. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif
8	Shepard Kugara (2025)	<i>Challenges in the Implementation of the New Curriculum in Physical</i>	1. Mengkaji tentang pelaksanaan kurikulum pada pembelajaran	1. Fokus penelitian untuk mengetahui tantangan yang dihadapi guru dalam

			<i>Education and Sport: A Case Study of Mhondoro Rural District, Mashonaland West Province in Zimbabwe</i>	pendidikan jasmani di sekolah dasar	pelaksanaan pembelajaran dan untuk memperoleh pengalaman guru dalam pedagogi kurikulum serta administrasi program Pendidikan Jasmani dan Olahraga di sekolah dasar
					2. Lokus penelitian
					3. Metode penelitian menggunakan kuantitatif
9	Simon Donkor Charles (2024)	Kormla dan Domfeh	<i>Classroom Practices of Basic School Teachers in the Implementation of the Standards-Based Physical Education Curriculum in Public Basic Schools in the Effutu Municipality, Ghana</i>	1. Mengkaji tentang penerapan kurikulum pendidikan jasmani di sekolah dasar	1. Fokus penelitian ada pada praktik kelas guru sekolah dasar dalam menerapkan kurikulum Pendidikan jasmani
					2. Lokus penelitian
					3. Menggunakan metode penelitian kuantitatif
10	Judith H. Bratten dan Jolanta Kilanowska (2021)		<i>"Physical education and new forms of activity following the implementation of the core curriculum in Norway in 2020".</i>	1. Mengkaji tentang penerapan kurikulum pendidikan jasmani 2. Menggunakan metode penelitian kualitatif	1. Fokus penelitian ada pada aspek-aspek kegiatan yang ada di dalam kurikulum Pendidikan jasmani
					2. Lokus penelitian

Sumber: Olah Data Penulis

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas, maka perbedaan dengan penelitian ini ada pada fokus dan lokus penelitian implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka Pada Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah. Fokus penelitian ini ada pada bagaimana implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka khususnya Mapel PJOK dan lokasinya berada di SDN 2 Sokaraja Tengah yang merupakan sekolah rekomendasi pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan (AMSP) yang telah diikuti oleh peneliti pada 14 Agustus-14 Desember 2023.

B. Landasan Teori

1. Adminitrasi Publik

Menurut Soekowaty dan The Liang Gie istilah administrasi berasal dari kata latin *ad* dan *ministrare* yang dalam bahasa Indonesia berarti membantu, melayani, atau memenuhi (Soekowaty & Gie, 2013). Sedangkan secara etimologi, kata publik berasal dari bahasa Inggris “*public*” yang artinya umum, masyarakat, atau negara (Malawat, 2022:72). Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai pengertian administrasi publik (Keban, 2019):

- a. Dimock, Dimock, dan Fox, administrasi publik merupakan produksi barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen.
- b. Barton & Chappel mendefinisikan administrasi publik sebagai *the work of govermnet* atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah.
- c. Nigro & Nigro, administrasi publik adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup tiga cabang yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif; mempunyai peranan penting dalam memformulasikan kebijakan publik, sehingga menjadi bagian dari proses politik; yang sangat berbeda dengan cara-cara yang ditempuh oleh administrasi swasta; dan berkaitan erat dengan beberapa kelompok swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

- d. Nicholas Henry memberi batasan bahwa administrasi publik merupakan suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosi pemahaman tentang peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan upaya kerjasama yang dilakukan oleh kelompok dalam lingkungan publik untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat agar kebutuhan publik terpenuhi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perjalanannya ilmu administrasi publik terus mengalami perkembangan dengan kemunculannya paradigma atau perspektif baru dari berbagai ahli. Berikut adalah paradigma administrasi publik:

- a. *Old Public Administration* (OPA), disebut paradigma administrasi publik klasik perkembangannya diprakasai oleh Woodrow Wilson dalam bukunya yang berjudul *The Study of Administration* (1887). Paradigma ini terdapat dikotomi antara urusan politik dan administrasi serta lebih menekankan pada prinsip efisiensi (Supriyadi, 2021).
- b. *New Public Administration* (NPA), menurut Goerge Federickson paradigma ini muncul karena adanya beberapa krisis yang terjadi secara bersamaan di tahun 1960-an: 1) pemerintah mendukung suburbanisasi yang menyebabkan terjadinya krisis kekotaan; 2) krisis rasial yang terjadi akibat adanya krisis kekotaan; 3) krisis semakin luas hingga pada ranah krisis energi, lingkungan, kesehatan, transportasi dan krisis lain yang mempengaruhi administrasi publik (Alamsyah, 2016). Adanya krisis tersebut menyebabkan administrasi publik yang sebelumnya menekankan pada prinsip efisiensi, kemudian ditambah dengan menekankan

pada pelayanan yang dapat meningkatkan keadilan sosial (Supriyadi, 2021).

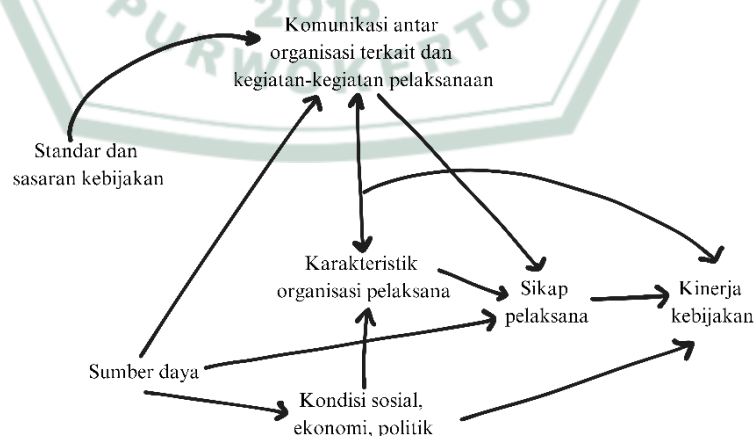
- c. *New Public Management* (NPM), Paradigma ini muncul karena terjadi berbagai permasalahan (Supriyadi, 2021): 1) ketidakmampuan pemerintah dalam menangani masalah publik; 2) birokrasi yang dianggap besar dimana informasi dapat diakses dengan cepat namun masyarakat menilai tidak sebanding dengan penyelesaian masalah yang terjadi; 3) sistem birokrasi yang kolot sehingga para birokrat tidak dapat mengeluarkan potensinya dalam bekerja dan menurunkan tingkat kreativitas pegawai; 4) banyak pemerintahan di Amerika dianggap tidak tahu dan tidak cakap dalam melayani masyarakat. Dari permasalahan-permasalahan tersebut kemudian menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Adanya krisis tersebut, Osborne dan Gaebler menawarkan pemikiran baru dengan memasukkan dan menerapkan semangat wirausaha dalam lingkungan birokrasi. Perspektif ini lebih menekankan pada nilai-nilai efisiensi, produktivitas, dan bisnis ke dalam sektor publik agar mengatasi kondisi birokrasi yang terlalu besar, boros, inefisiensi, merosotnya kinerja pelayan publik, kurangnya terhadap pengembangan dan kepuasan kerja pegawai pemerintah (Alamsyah, 2016).
- d. *New Public Service* (NPS), NPS muncul sebagai bentuk kritik dari para ahli terhadap NPM yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip pelayanan publik. Denhart dan Denhart mengusulkan penerapan nilai-nilai baru yaitu dengan mengembalikan pihak yang dilayani dari pelanggan ke warga negara atau *citizen* dan mengembalikan peran pemerintah dari pengarah ke pelayan publik (Alamsyah, 2016). Kemudian memunculkan aspek kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Berdasarkan uraian di atas maka topik pada penelitian ini termasuk dalam paradigma *New Public Service* (NPS) karena

implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka menekankan pada aspek keadilan dan kebebasan dimana pihak pelaksana yaitu sekolah dan guru dapat merancang kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, minat maupaun bakat siswa. Selain itu adanya Kurikulum Merdeka juga memberikan ruang bagi guru maupun sekolah untuk melakukan kolaborasi dengan pihak luar.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun dalam kelompok yang dimaksudkan untuk dapat mencapai suatu tujuan yang sebagaimana telah ditetapkan dalam kebijakan (Majo, 2023). Tahap implementasi hanya akan berjalan ketika pemerintah sudah menetapkan peraturan dan mengalokasikan dana untuk membiayai implementasi kebijakan. Studi mengenai implementasi kebijakan berfokus pada aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dijalankan dalam rangka melaksanakan keputusan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga dapat memberikan penjelasan mengenai salah satu atau beberapa kekuatan yang menentukan dampak kebijakan (Situmorang, 2016).



Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn
(Tachjan, 2006)

Model yang dikembangkan Van Meter dan Van Horn (1975) dikenal sebagai *A Model of the Policy Implementation Process* yang didalamnya menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan yaitu (Situmorang, 2016):

1. Standar dan sasaran kebijakan yang jelas dan terukur sehingga dapat terealisasi
2. Sumber daya yang mendukung baik berupa sumber daya manusia maupun non manusia
3. Karakteristik organisasi pelaksana mencakup struktur organisasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Semua ini akan mempengaruhi proses implementasi suatu program
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Implementasi suatu kebijakan akan berjalan efektif apabila setiap implementator memahami standar dan sasaran kebijakan, oleh karena itu diperlukan perhatian khusus terhadap kejelasan standar dan sasaran implementasi, baik dari ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana maupun konsistensi atau keseragaman dari standar dan sasaran yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.
5. Sikap para pelaksana yang merupakan tanggapan atau persepsi dari para implementator terhadap kebijakan. Terdapat tiga unsur respon pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan yaitu pemahaman tentang kebijakan, tanggapan kebijakan dan intensitas tanggapan.
6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang mendukung implementasi kebijakan

Selanjutnya terdapat model implementasi George C. Edward III yang dinamakan *direct and indirect impact on implementation* (Firdaus,

2019). Dalam teori ini dijelaskan bahwa terdapat empat variabel yang dapat berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap implementasi kebijakan publik yaitu (Sutikno, 2020):

1. Komunikasi menjadi proses yang mendukung jalannya implementasi kebijakan publik, karena efektivitasnya akan terwujud apabila tujuan dari kebijakan dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh setiap individu untuk mencapai tujuannya. Komunikasi bertujuan agar perumus kebijakan dan implementator dapat melaksanakan kebijakan secara konsisten sesuai kebijakan yang sudah ditetapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.
2. Sumber daya menjadi variabel penting dalam proses implementasi kebijakan publik, karena meliputi staf yang memiliki keahlian dan kemampuan kompeten serta profesional sesuai bidangnya. Indikator yang terdapat dalam variabel sumber daya yaitu: staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.
3. Disposisi atau sikap pelaksana berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan publik, hal ini dapat dilihat melalui tiga respon yaitu kesadaran pelaksana, petunjuk pelaksana dan intensitas. Indikator yang perlu dicermati pada variabel disposisi yaitu pengangkatan birokrasi dan insentif.
4. Struktur birokrasi adalah karakteristik dari hubungan dalam suatu organisasi baik potensial maupun nyata dalam menjalankan kebijakan dengan norma-norma dan pola hubungan yang terjalin secara berulang-ulang.

Kemudian Merilee S. Grindle berpendapat implementasi kebijakan publik merupakan proses umum tindakan administratif yang dilakukan oleh pemerintah atau sektor swasta dalam mencapai tujuan tertentu (Akib, 2010). Grindle memperkenalkan pendekatan implementasi kebijakan yang disebut *"implementation as a political*

and administrative process” menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh berbagai aktor berdasarkan program yang telah dicapai atau interaksi para pengambil keputusan dalam konteks politik administratif (Mubarok et al., 2020). Ciri khas dari model ini adalah adanya interaksi antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pengguna kebijakan dalam suatu model interaktif. Terdapat dua variabel untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan (Fajarwati & Rahmadila, 2022):

1. Isi kebijakan (*content of policy*), meliputi:
 - a. Kepentingan yang mempengaruhi (*Interest Effectuated*), berbagai kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik.
 - b. Tipe manfaat (*Type of Benefits*) yang menunjukkan bahwa isi dari suatu kebijakan harus memuat beberapa manfaat yang memberikan dampak positif.
 - c. Derajat perubahan yang ingin dicapai (*Extent of Change Envision*), yang menunjukkan bahwa isi kebijakan harus memiliki target yang akan dicapai dan skala yang jelas.
 - d. Letak pengambilan keputusan (*Site of Decision Making*), yang menjelaskan bahwa pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat.
 - e. Pelaksanaan program (*Program Implementer*), yang mana dalam implementasi suatu kebijakan harus didukung dengan pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel bagi keberhasilan suatu kebijakan.
 - f. Sumber daya (*Resources Committed*), yang mendukung pelaksanaan kebijakan agar berjalan dengan baik.
2. Lingkungan implementasi (*content of implementation*), meliputi:
 - a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*).

Artinya mempertimbangkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat guna memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan publik.

- b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (*Institution and Regime Characteristic*). Lingkungan dimana suatu kebijakan akan diterapkan berpengaruh terhadap keberhasilannya, ini diartikan sebagai karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
- c. Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana (*Compliance and Responsiveness*), artinya sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana terhadap suatu kebijakan.

Dari berbagai penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses dari pelaksanaan kebijakan publik yang telah direncanakan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini akan menggunakan model implementasi dari Van Meter dan Van Horn (1975) karena menurut penulis variabel yang ada dalam model ini dapat menjawab rumusan masalah sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

3. Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dimana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024). Guru memiliki kebebasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga kegiatan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Kurikulum Merdeka sebelumnya disebut dengan kurikulum prototipe merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2013. Kurikulum ini hadir untuk mengatasi permasalahan krisis pembelajaran pasca pandemi Covid-19 (Setiyorini & Setiawan, 2023). Sekolah juga

dapat memilih IKM secara mandiri yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi (Mulyasa, 2023).

Dalam Permendikbudristek Ri Nomor 12 Tahun 2024, dijelaskan bahwa Tujuan dari Kurikulum Merdeka adalah untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia serta menumbuhkembangkan cipta, rasa, dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Dalam aturan tersebut juga dijelaskan beberapa prinsip utama dari Kurikulum Merdeka:

- a. Pengembangan karakter, yaitu pengembangan potensi spiritual, moral, sosial, dan emosional peserta didik, baik dengan pengalokasian waktu khusus maupun secara terintegrasi dengan proses pembelajaran;
- d. Fokus pada muatan esensial, yaitu berpusat pada muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik agar pendidik memiliki waktu yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan bermakna;
- e. Fleksibel, yaitu dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat.

Dasar dari pelaksanaan Kurikulum Merdeka tercantum dalam Permendikbudristek RI Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Merdeka Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa Kurikulum Merdeka mencakup kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Pasal 3 menyebutkan bahwa kerangka dasar kurikulum merupakan rancangan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum dan memuat tujuan, prinsip, karakteristik pembelajaran, landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan psikologis. Pasal 5 ayat 1 menjelaskan, struktur kurikulum merupakan

pengorganisasian atas kompetensi, muatan pembelajaran dan beban belajar. Kemudian pasal 7 menyebutkan jika struktur kurikulum memuat intrakurikuler, korikuler, dan ekstrakurikulis sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan.

4. Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan

Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan yang selanjutnya disingkat Mapel PJOK merupakan mata pelajaran wajib pada seluruh tingkat sekolah mulai dari dasar hingga menengah. Pada proses pembelajaran Mapel PJOK melibatkan aktivitas fisik yang dilakukan di ruang terbuka seperti lapangan. Menurut Qomarullah, Pendidikan Jasmani mencakup unsur kebugaran, kesehatan, keterampilan gerak fisik, permainan, olahraga, permainan, rekreasi dan tari. Tujuan Mapel PJOK adalah untuk menumbuh kembangkan berbagai potensi siswa meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor (Juditya et al., 2022).

Pembelajaran Mapel PJOK pada Kurikulum Merdeka dapat mendukung pertumbuhan fisik, mental, dan sosial siswa. Melalui aktivitas fisik dan olahraga siswa tidak hanya belajar mengenai kesehatan dan kebugaran, tetapi juga melatih keterampilan motorik. Dengan aktivitas olahraga seperti permainan maka dapat membangun *teamwork*, kolaborasi, dan disiplin pada siswa. Pembelajaran PJOK dalam Kurikulum Merdeka membantu untuk membentuk kecerdasan emosional yang baik bagi siswa seperti rasa percaya diri, jujur, dan melatih kemampuan menghadapi tantangan. Dengan demikian, Mapel PJOK begitu penting untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan siswa.

Dengan adanya kondisi tersebut maka penelitian ini dilaksanakan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada Mapel Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) yang ada di SDN 2 Sokaraja Tengah. Dasar dari pelaksanaan IKM berpedoman pada Permendikbudristek RI Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Merdeka Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Murdiyanto, 2020 penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan acara kuantifikasi lainnya. Keunggulan dari metode penelitian kualitatif adalah pembahasannya lebih mendalam dan terpusat karena data digali secara mendalam (Semiawan, 2010). Tujuan penulis menggunakan metode ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah. Pertanyaan tersebut memerlukan jawaban yang bersifat deskriptif untuk dapat menjelaskan mengenai kondisi nyata atau fakta-fakta yang terjadi terkait dengan masalah yang akan diselidiki. Lokasi dari penelitian ini adalah SDN 2 Sokaraja Tengah.

Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan *purposive sampling* dengan sampel terdiri dari 8 informan yang dianggap memiliki karakteristik dan pengalaman terhadap implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah, diantaranya Kepala Sekolah; Guru Mapel PJOK; siswa kelas 5; dan Ketua KGG Mapel PJOK Kecamatan Sokaraja. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan model dari Miles dan Huberman (1984) yang memiliki tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi (Murdiyanto, 2020).